

ANALISIS KETERLIBATAN TURKI DALAM KONFLIK NAGORNO-KARABAKH: STUDI KASUS SEPTEMBER WAR 2020

Abisatya Kurnia Jati¹,Ervina Ashyaningtyas²,Hamis Nurhan³, Hawa Aunal Fanfa⁴

^{1,2,3,4}Mahasiswa Prodi Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Sebelas Maret

ABSTRAK

Perang 44 hari atau *September War* merupakan salah satu dari rangkaian peperangan yang terjadi dalam Konflik Nagorno-Karabakh antara Azerbaijan melawan Armenia. Latar Belakang terjadinya *September War* adalah kontak senjata antara Azerbaijan dan Armenia ke Tovuz yang merupakan wilayah Azerbaijan. Dalam jalannya perang, negara tetangga mereka yaitu Turki melibatkan diri sebagai pendukung Azerbaijan. Penelitian ini berusaha mengetahui kepentingan Turki dalam keterlibatannya pada *September War*. Berkaitan dengan permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan konsep kepentingan nasional sebagai landasan teori. Melalui analisis yang telah dilakukan, ditemukan beberapa hal terkait kepentingan Turki dalam perang tersebut. Pertama, Turki dan Azerbaijan dekat secara kebudayaan melalui semangat atau prinsip “*One Nation Two States*”. Kedua, Turki sedang dalam usaha untuk mengamankan persediaan energi dalam negerinya dan membutuhkan pasokan dari Azerbaijan. Pengamanan energi yang dilakukan Turki ini sekaligus berusaha mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari Rusia sehingga Azerbaijan menjadi pilihan terbaik. Selanjutnya, kepentingan Turki dalam jalannya perang tersebut adalah untuk memasarkan produk-produk militer buaatannya kepada Azerbaijan. Turki menjadi salah pemasok produk-produk militer ke Azerbaijan, sedangkan persenjataan Armenia banyak dipasok oleh Rusia. Terakhir, perang ini merupakan *proxy war* antara Turki dan Rusia dimana keduanya tidak terlibat secara langsung dengan mempersenjatai Azerbaijan dan Armenia. Dari keempat hal tersebut, kepentingan Turki dalam Perang 44 hari tidak lepas dari usahanya untuk memperkuat posisi dan pengaruh di wilayah Kaukasus Selatan, khususnya di Azerbaijan.

Kata Kunci: kepentingan Turki, September War, Konflik Nagorno-Karabakh

PENDAHULUAN

Konflik antara Armenia dan Azerbaijan merupakan salah satu konflik perang menahun yang berakar sejak akhir abad ke-19 (Praeger, 1998), ketika kedua negara tersebut masih berada di bawah kekaisaran Rusia. Kedua negara ini mengokupasi daerah geografis yang disebut sebagai Transkaukasus—daerah yang terletak di Tanah Genting selatan dari Pegunungan Kaukasus dan di antara Laut Hitam dan Laut Kaspia. Daerah Transkaukasus ini merupakan daerah yang dianggap penting dan strategis karena terletak di perbatasan antara Eropa dan Asia, sehingga daerah ini sering menjadi daerah pergerakan manusia seperti perdagangan, perpindahan, hingga perang dari abad ke abad. Akibat adanya mobilisasi inilah, orang-orang Romawi, Arab, dan Turki, menanamkan pengaruhnya di daerah ini. Kristenisasi dari Romawi

kemudian mengakar di Georgia dan Armenia, sedangkan pengaruh Islam mengakar di Azerbaijan dan daerah-daerah Kaukasus Utara yang lain, mengikuti invasi Arab ke daerah tersebut pada tahun 640 M.

Setelah melewati berbagai invasi banyak kekaisaran dari Romawi hingga Ottoman, daerah Transkaukasia berhasil jatuh di tangan kekaisaran Rusia setelah terjadinya perang Russo-Ottoman di tahun 1878. Georgia, Armenia, dan Azerbaijan resmi menjadi daerah otonomi Uni Soviet di tahun 1917 dalam revolusi Bolshevik. Hingga tahun 1991, Nagorno-Karabakh, sebuah wilayah kecil terpencil yang terletak di Pegunungan Kaukasus diputuskan oleh Stalin pada tahun 1921 sebagai daerah otonom di dalam Republik Sosialis Soviet Azerbaijan (Emma Klever, 2013). Pada tahun 1988, Nagorno-Karabakh yang mayoritas penduduknya adalah Armenia, meminta untuk bersatu dengan Republik Sosialis Soviet Armenia yang tentunya ditolak oleh otoritas Soviet, yang kemudian memicu kekerasan antara Azerbaijan dan Armenia baik di dalam maupun di luar Nagorno-Karabakh. Hingga tahun 1991, Uni Soviet berusaha memulihkan dan menjaga ketertiban. Namun, ketika Uni Soviet runtuh dan Azerbaijan dan Armenia menyatakan diri mereka merdeka, kekerasan kembali terjadi. Ketika Nagorno-Karabakh mendeklarasikan dirinya secara resmi merdeka setelah referendum pada akhir tahun 1992, pertempuran sengit terjadi dan pasukan Armenia menduduki baik Nagorno-Karabakh maupun wilayah sekitarnya.

Banyak yang tewas dalam perang etnis tersebut, dan tidak sedikit pula yang terpaksa mengungsi. Lebih dari setengah juta orang Azerbaijan dikategorikan sebagai Pengungsi Internal, yang berasal dari Nagorno-Karabakh atau daerah sekitarnya. Pada tahun 1994, perjanjian gencatan senjata ditandatangani. Perjanjian gencatan senjata yang disebut Line of Contact ini membahas mengenai perbatasan daerah kekuasaan Armenia dan Azerbaijan. Armenia memegang kendali militer atas Nagorno-Karabakh dan sekitar wilayah Azerbaijan, membangun koridor ke Armenia. Di Nagorno-Karabakh sebuah republik de-facto telah didirikan, yang bagaimanapun tidak diakui oleh negara manapun, termasuk Armenia. Perundingan damai antara Azerbaijan dan Armenia dipimpin oleh OSCE Minsk Group, lembaga mediasi utama yang dilakukan oleh Amerika Serikat, Rusia dan Perancis Namun tidak ada perkembangan berarti yang telah dilakukan oleh grup tersebut. Hingga Juni 2013, proses perdamaian hanya berujung jalan buntu. Selain pergerakan yang dilakukan oleh Minsk Group, Turki juga mendeklarasikan posisinya dalam perang ini, yakni sebagai aliansi dari Azerbaijan (Fariz Ismailzade, 2006).

Konflik ‘September War’ 44 hari

Perang 44 hari yang melibatkan Azerbaijan dan Armenia pada 27 September 2020 sebenarnya berakar dari beberapa aspek yang menaunginya di dua bulan ke belakang. Tepatnya pada 12-16 Juli 2020, militer Armenia dan Azerbaijan saling melancarkan serangan menggunakan artileri di daerah perbatasan, Tovuz. Motif dari kejadian saling serang tersebut tentunya tidak terlepas dari konflik wilayah Nagorno-Karabakh yang saling diperebutkan. Kendati demikian, akar konflik dari serangan pada Juli tersebut tidak menemui titik terang. Andrew S. Bowen dalam jurnalnya yang berjudul “Azerbaijan and Armenia: The Nagorno-Karabakh Conflict”, menyebutkan bahwa konflik tersebut sejatinya mengarah kepada ketidak sengajaan. Setidaknya ada 12 militer Azerbaijan, 5 tentara Armenia, dan 1 warga sipil asal

Azerbaijan yang harus kehilangan nyawa pada peristiwa akar konflik Juli 2020. Berangkat dari aksi protes besar-besaran pada pertengahan tahun tersebut, baik dari masyarakat Azerbaijan maupun Armenia sama-sama mendesak pemerintah untuk mengeluarkan kekuatan yang lebih besar. Hal tersebut juga disampaikan oleh pihak pemerintah Armenia, Perdana Menteri Pashinyan, yang meminta pemerintah untuk lebih memperkuat sistem keamanan di wilayah Nagorno-Karabakh. Dengan adanya hal itu, kedua belah pihak pun terus mengemukakan tensinya di dalam negeri guna memantik pertempuran yang lebih besar.

Pihak luar seperti Rusia pun juga terlibat dalam akar konflik ini. Sesaat setelah bentrokan terjadi, pejabat Azerbaijan melancarkan kritik keras terhadap penerbangan transportasi militer Rusia ke Armenia. Pemerintah Azerbaijan berpendapat bahwa telah terjadi distribusi senjata melalui pada kejadian tersebut. Menanggapi hal tersebut, pihak Rusia pun langsung merespons dengan bantahan terkait tuduhan yang melibatkannya. Terlepas dari hal itu, pihak Azerbaijan pun mulai memperkuat armadanya dengan meminta bantuan rekannya, Turki, guna melangsungkan latihan militer bersama pada Agustus 2020. Tidak berhenti disitu saja, Turki juga dilaporkan telah menjual 120 juta dollar peralatan militer ke Azerbaijan sejak awal 2020 hingga Agustus. Setelah itu, konflik pun mulai memanaskan ketika Azerbaijan dan Armenia terlibat saling hasut perihal perebutan perbatasan. Perang pun terjadi pada akhir September 2020 yang ditunggangi kepentingan Azerbaijan untuk merebut kembali beberapa wilayahnya di Nagorno-Karabakh yang telah direbut pada 1990 an. Kurang lebih selama 44 hari, militer Azerbaijan dan Armenia sama-sama saling serang secara bertahap. Di sini, Azerbaijan sangat diunggulkan sebab peralatan militernya yang terlampaui canggih dari Armenia. Terdapat pesawat tanpa awak dan drone yang menjadi alat militer utama pihak Azerbaijan untuk mengidentifikasi posisi musuh (REICH,2021).

Di sisi lain, Armenia hanya mengandalkan kendaraan berlapis baja sehingga mudah hancur oleh pihak lawan. Tercatat, kerugian besar harus dirasakan Armenia berkat tidak mampu menahan gempuran lawan. Meskipun begitu, pihak Armenia secara mengejutkan bisa memukul mundur pasukan Azerbaijan di wilayah pegunungan utara Nagorno Karabakh. Setelah saling gempur selama kurang lebih enam minggu, pasukan Azerbaijan berhasil merebut wilayah Fuzuli, Jabrayi, dan Zangilan, serta mengamankan perbatasan dengan Iran. Militer Azerbaijan juga sempat berusaha merebut kota Lachin yang merupakan kawasan paling strategis di Nagorno-Karabakh meskipun akhirnya gagal. Usai gagal merebut wilayah tersebut, Azerbaijan pun juga beranjak untuk mengambil wilayah Shusha dan akhirnya berhasil. Wilayah Shusha juga bisa dikatakan sangat strategis sebab letaknya berada di jalan raya antara Armenia dengan Nagorno-Karabakh. Dalam pertempuran tersebut, dilaporkan kurang lebih sebanyak 6000 kematian pasukan dalam peperangan selama 44 hari tersebut. Tidak hanya itu, total 150 warga sipil juga turut menjadi korban dalam pertempuran bertajuk “September War” itu.

November 2020 Agreement

Setelah 44 hari bertempur, kedua belah pihak memutuskan untuk gencatan senjata pada 9 November 2020. Hal itu diawali oleh pertemuan antara Presiden Azerbaijan Aliyev dan Perdana Menteri Armenia Pashinyan yang dimediasi oleh Presiden Rusia Putin. Perjanjian damai tersebut terkemas dalam “November 2020 Agreement” yang berisikan 7 aspek yang

harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Beberapa aspek yang dimaksud di antaranya adalah pengembalian wilayah sekitar Nagorno Karabakh di bawah kendali Azerbaijan, pengerahan kurang lebih 2000 pasukan penjaga perdamaian oleh Rusia, pendirian pusat penjaga perdamaian, penarikan pasukan Armenia, pemeliharaan wilayah darat antara Armenia dengan Nagorno-Karabakh, pengembalian warga sipil yang terlantar akibat konflik, dan pembangunan jalur transportasi darat meliputi Armenia dan Azerbaijan. Dalam ketujuh poin tersebut, Rusia sebagai mediator berusaha untuk menjaga stabilitas wilayah agar tidak berkonflik lagi. Alhasil, militer dari kedua belah pihak diwajibkan untuk tetap pada posisinya. Tidak hanya itu saja, beberapa poin yang dimuat dalam perjanjian tersebut bersumber dari Group Minsk. Hingga kini, buah dari perjanjian tersebut pun dirasakan oleh kedua belah pihak sehingga tensi tinggi antara Armenia dan Azerbaijan tidak mengalami eskalasi. Meskipun dilaporkan telah terjadi bentrokan kecil-kecilan yang melibatkan warga sipil, namun hal tersebut tidak membuat kedua negara terpantik untuk saling adu serang lagi (Bowen, 2021).

KERANGKA TEORETIK

Teori Kepentingan Nasional

Kepentingan Nasional merupakan suatu istilah yang sering muncul dalam disiplin Ilmu Hubungan Internasional yang pertama kali dikemukakan oleh penulis Hans J. Morgenthau (2022) ketika teori realisme mendominasi studi Hubungan Internasional pasca Perang Dunia ke-2. Kepentingan Nasional, menurut Morgenthau, merupakan entitas yang mendorong suatu negara untuk terus mengembangkan aktivitas politiknya (SEAN MOLLOY, 2004). Morgenthau berargumen bahwa kepentingan nasional merupakan jantung dari semua politik, sehingga dalam skala internasional, membentuk suatu sistem bagi setiap negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya dengan cara apapun (Peter Pham, 2015). Pencapaian kepentingan nasional ini tidak terlepas dari usaha suatu negara untuk mencapai, meningkatkan, dan mendemonstrasikan *power*, yang mana hal ini kemudian menjadi suatu pola dalam menentukan arah kebijakan luar negeri negara tersebut.

Dalam rangka menentukan arah kebijakan luar negeri negaranya, Turki tentu saja mempertimbangkan faktor-faktor pendukung untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Posisi Turki yang merupakan salah satu negara yang berpengaruh di Kawasan Timur Tengah menjadikan arah kebijakan luar negerinya harus tepat sasaran agar kebijakan tersebut dapat semakin meningkatkan eksistensi Turki dalam pencapaian kepentingan nasionalnya (Nainggolan, 2020). Keterlibatan Turki dalam konflik wilayah yang terjadi di salah satu bagian daerah kawasan Timur Tengah yaitu Nagorno Karabakh, menandakan bahwasanya arah kebijakan luar negeri Turki dalam konflik tersebut terdapat suatu “kepentingan” Turki di sana. Keberpihakan Turki di kubu Azerbaijan pun memiliki latar belakang yang dapat dimengerti. Hubungan diplomatik antara Turki dan Azerbaijan, kondisi hubungan Turki dan Armenia yang kurang harmonis, serta adanya kepentingan ekonomi Turki di Azerbaijan merupakan berbagai alasan mengapa Turki terlibat dalam konflik Nagorno-Karabakh ini (Lisbet, 2020).

DISKUSI

Arah Kebijakan Luar Negeri Era Presiden Erdogan

Turki sebagai salah satu negara yang menjadi perbatasan antara benua Asia dan Eropa. Banyak irisan budaya serta ideologi yang bergulir di Turki. Pada masa pemerintahan Mustafa Kemal, Turki mendeklarasi sebagai negara sekuler, dimana posisi agama berada di ruang privat dengan di bawah kontrol negara. Hal ini didasari dengan adanya pandangan Sekularisme bagi Mustafa Kemal adalah pilihan paling tepat untuk membawa Turki menjadi lebih baik serta membangun peradaban yang lebih maju. Tetapi, seiring berjalannya waktu terdapat perubahan gejolak identitas di Turki dimana terjadi kelunturan sekularisme disana. Masyarakat juga mulai berpendapat bahwasanya gagasan sekularisme yang digadang Mustafa Kemal telah kehilangan orientasi dan mencoba bermain jalur politik secara sehat, mereka mendirikan partai dan mengikuti pemilu secara konstitusional. Oleh karena itu kemudian terjadi perkembangan dan seleksi terhadap pemimpin Negara Turki, muncul sosok Recep Tayyip Erdoğan sebagai salah satu kandidat yang sesuai dengan perkembangan Turki. Pada tahun 2014, Erdogan resmi dinobatkan sebagai Pemimpin negara Turki (Azzam,2021). Erdogan yang sebelumnya menjabat sebagai perdana menteri yang memiliki karir gemilang dan multitalenta. Berkenaan dengan ini kebijakan luar negeri Turki pada masa pemerintahan Erdogan mengalami banyak perubahan dalam orientasi arah dasarnya dalam hubungannya dengan negara-negara yang menjadi mitra diplomatiknya terutama negara yang berbatasan dengan Turki.

Secara geografis, Turki berbatasan langsung dengan Armenia, tetapi hubungan antar keduanya tidak begitu harmonis karena ada latar belakang sejarah disana. Tidak memiliki hubungan diplomatik yang resmi serta permasalahan yang tak kunjung selesai di kedua belah pihak salah satunya adalah konflik Nagorno Karabakh dengan wilayah Azerbaijan yang menarik Turki untuk terlibat disana. Dalam konflik tersebut, terdapat keterlibatan Turki dimana Turki memiliki kepentingan etnis yang menjadi pertimbangan Turki untuk mendukung dan membantu Azerbaijan dalam konflik itu. Dimana Turki dan Azerbaijan memiliki kesamaan etnis dan hubungan keduanya sering direpresentasikan melalui “*one nation, two states*” (Widigdo,2015). Sehingga Turki mendukung Azerbaijan untuk mengalahkan Armenia dan menutup perbatasan di Dogu Kapi dan Igridir yang berbatasan dengan wilayah barat Armenia. Berhubungan dengan letak geografis Turki yang terletak di jantung Afrika, Asia, dan Eropa, Turki tidak dapat berpaling dari Timur atau Barat. Dimana dengan melaksanakan dengan menetapkan kebijakan luar negerinya sembari melindungi hak-hak nasional dan internasional negaranya Turki akan dapat menjadi negara yang berpengaruh dan mendapat mitra yang baik.

Kebijakan Luar Negeri Turki era Erdogan, mengenai konflik di Nagorno-Karabakh, Erdogan memerintahkan kelompok MINSK yang menaungi masalah ini sudah membuat masalah konflik tersebut menjadi lebih rumit, apalagi untuk memperbaikinya. Dengan berpihak dan mendukung pada Azerbaijan, Ankara mendukung Baku dalam upayanya untuk membebaskan wilayah di bawah pendudukan Armenia. Selama konflik 44 hari, yang berakhir dengan gencatan senjata pada 10 November 2020, Azerbaijan membebaskan beberapa kota dan hampir 300 pemukiman dan desa di Karabakh dari hampir tiga dekade pendudukan Armenia (Berker, 2020). Dimana hal ini membuktikan bahwasanya Arah kebijakan Luar Negeri Turki

terhadap Konflik Nagorno-Karabakh dilandasi oleh adanya kepentingan nasional, persamaan etnis sejarah Azerbaijan, dan mengupayakan permasalahan konflik di Timur Tengah.

Posisi Turki sebagai Pelindung Azerbaijan

Perang 44 hari atau September War yang termasuk dalam Konflik Nagorno-Karabakh ini melibatkan empat negara yang menjadi “pemain kunci”, yaitu Azerbaijan, Armenia, Turki, dan Rusia. Azerbaijan dan Armenia merupakan dua negara yang terlibat dalam konflik dan berperang secara langsung. Sedangkan Turki dan Rusia melibatkan diri dalam konflik tersebut secara tidak langsung dan melakukan *proxy war* satu sama lain. Dalam hal ini, posisi Turki berada di belakang Azerbaijan, sedangkan Armenia didukung oleh Rusia. Namun mengapa demikian? Mengapa Turki memberikan dukungan kepada Azerbaijan? Pada poin pendahuluan ini akan dibahas secara mendalam tentang posisi Turki dalam konflik sebagai salah satu pengantar menuju kepentingan Turki pada poin pembahasan.

Dalam sejarahnya hubungan Turki dengan Azerbaijan sudah dimulai sejak awal kemerdekaan Azerbaijan pada 30 Oktober 1991. Turki merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan Azerbaijan pada November 1991. Hal ini dilatarbelakangi oleh ada perkembangan Negara Azerbaijan di bawah Rezim Heydar Aliyev, dimana pada masa kepemimpinannya Heydar berhasil mengembangkan potensi cadangan minyak Azerbaijan di Ibukotanya, Baku sebagai komoditas utama. Saat itu Azerbaijan mampu mengurangi angka pengangguran dan menekan kasus perjudian di negaranya. Heydar juga berusaha menjalin hubungan dengan Turki untuk membantu penyelesaian permasalahan konflik Nagorno-Karabakh secara damai dengan Armenia (Unhamzah,2021). Hubungan diplomatik Turki dan Azerbaijan terjalin sejak 14 Januari 1992 dan memiliki Konsulat Jenderal di Baku di tingkat Kedutaan. Turki juga memiliki dua Konsulat Jenderal di Nakhchivan dan Ganja sementara Azerbaijan diwakili oleh Kedutaan Besarnya di Ankara dan dua Konsulat Jenderal di Istanbul dan Kars.

Turki dan Azerbaijan merupakan kedua negara yang dekat secara agama dan kebudayaan karena masyarakatnya sama-sama mayoritas muslim. Meskipun demikian, kedua negara tersebut memiliki aliran agama yang berbeda, di mana Turki sebagian besar bercorak sunni sedangkan Azerbaijan mayoritas menganut syiah (Unhamzah,2021). Proses islamisasi Azerbaijan dan kuatnya pengaruh Islam Turki sudah ada sejak masa lalu, dimana Turki masih berada di bawah aliran sunni Kekaisaran Usmani (1299-1922) dan Azerbaijan di bawah sunni Konfederasi Kaya Koyunlu (1380-1468) dan syiah Dinasti Safawiyah (1501-1732) (Bedford,2021). Agama Islam di Azerbaijan sendiri telah membentuk identitas yang unik sebagai Islam Azerbaijan, yaitu berdamainya syiah dan sunni. Pembentukan identitas ini sebagian besar dipengaruhi oleh kebijakan anti-agama dari Uni Soviet yang seakan mengisolasi penduduk muslim Azerbaijan dari dunia Islam. Identitas Islam Azerbaijan dapat dikatakan sebagai kunci dari alasan diterimanya Islam Turki di negara tersebut. Meskipun syiah menjadi kelompok mayoritas dalam Islam di Azerbaijan, negara tersebut membentuk SCRWO (*State Committee for Work with Religious Organizations*) untuk mengawasi penyebaran agama dari luar negara atau *imported religion*, termasuk dari Turki, sehingga tercipta toleransi dan mengedepankan sekularisme. Oleh karena itu, Azerbaijan menganggap penyebaran Islam Turki tidak berbahaya dan tidak mengganggu sekularisme negara tersebut.

Kedekatan Turki dan Azerbaijan secara budaya juga merupakan faktor yang mempengaruhi posisi Turki dalam Konflik Nagorno-Karabakh, selain agama. Terdapat konsep “*Outside Turks*” yang menyebutkan bahwa homogenitas identitas Turki atau *Turkish* berasal dari akar kebudayaan dan bahasa yang sama. Negara-negara yang termasuk dalam *Outside Turks* diantaranya adalah Azerbaijan, Turkmenistan, Kazakhstan, Kirgistan, dan Uzbekistan. Azerbaijan diketahui merupakan salah satu negara yang juga menggunakan bahasa Turki, selain bahasa mereka sendiri. Kemudian terdapat konsep yang menjadi dasar filosofis dari hubungan Turki-Azerbaijan bernama “*One Nation Two States*” yang dikemukakan oleh mantan Presiden Azerbaijan, Heydar Aliyev. Konsep ini banyak diartikan sebagai hubungan saudara antara Turki dan Azerbaijan. Mengutip artikel jurnal yang ditulis oleh Suvari, terdapat hirarki dalam konsep hubungan kedua negara ini yaitu Turki sebagai “saudara besar” yang melindungi Azerbaijan. Frasa pertama dalam konsep ini, yaitu *One Nation* memiliki makna bahwa Turki dan Azerbaijan memiliki kedekatan secara kebudayaan bangsa turk. Frasa kedua “*Two States*” ini merujuk kepada negara Turki dan Azerbaijan sendiri. Adapun hal-hal yang mendukung dijalankannya konsep tersebut adalah kedekatan geografis, sejarah, hubungan kebudayaan, kesamaan bahasa, karakteristik agama antara Turki dan Azerbaijan. Oleh karena itu konsep “*One Nation Two States*” sering dijadikan sebagai dasar filosofis dalam kerja sama strategis yang dilakukan oleh kedua negara, termasuk dalam menentukan posisi Turki pada Konflik Nagorno-Karabakh antara Armenia-Azerbaijan.

Hubungan Turki dengan Azerbaijan termasuk strategis, karena terdapat kekuatan utama pendorong utama yaitu hubungan bilateral yang berdasarkan banyak aspek. Mengunjungi negara satu sama lain selama perkembangan hubungan sebagai kepentingan simbolis kemudian menjadi tradisi. Dengan tujuan untuk semakin mempererat hubungan bilateral, pada tahun 2010 dibentuk mekanisme *High Level Strategic Cooperation Council* (HLSC) di tingkat Presiden. Mekanisme trilateral dan quadrilateral, yang dibentuk bersama dengan Azerbaijan, merupakan mekanisme penting yang berkontribusi pada stabilitas, perdamaian, dan kemakmuran regional. Republik Otonomi Nakhchivan merupakan satu-satunya hubungan darat antara Turki dan Azerbaijan, hal itu sangat penting bagi hubungan Turki dengan Azerbaijan karena merupakan titik kontak langsung Turki dengan rakyat Azerbaijan. Turki berkontribusi pada upaya yang ditujukan untuk penyelesaian konflik Nagorno-Karabakh dalam integritas teritorial dan kedaulatan Azerbaijan melalui cara damai. Dalam hal ini, sebagai anggota OSCE Minsk Group, Turki melanjutkan inisiatifnya.

Posisi Rusia Dalam Konflik

Turki dan Rusia diketahui memiliki keterlibatan dan campur tangan pada jalannya Perang 44 hari. Baik Turki maupun Rusia, keduanya sama-sama memiliki kepentingan geopolitik dalam perang yang merupakan bagian dari Konflik Nagorno-Karabakh tersebut. Seperti yang telah disebutkan pada poin sebelumnya, Turki menyatakan dukungannya kepada Azerbaijan, sedangkan Rusia kepada Armenia. Baik Turki maupun Rusia, keduanya berlomba untuk menanamkan pengaruh geopolitik di wilayah Kaukasus melalui konflik tersebut. Rusia sendiri memiliki hubungan ekonomi dan keamanan yang erat dengan Armenia. Kedua negara tersebut merupakan anggota dari *Collective Security Treaty Organization* (CSTO), sebuah aliansi pertahanan yang beranggotakan Rusia dan beberapa negara pecahan Uni Soviet,

termasuk Armenia sebagai akibat dari runtuhnya Pakta Warsawa (Bowen,2021). Melalui CSTO, Rusia dan Armenia memiliki komitmen untuk saling membantu ketika salah satu dari mereka diserang oleh negara lain Selain melalui CSTO, Rusia dan Armenia juga melakukan kerja sama militer secara bilateral, beberapa di antaranya adalah penempatan ribuan tentara, sistem pertahanan udara (arhanud), dan peralatan tempur lain termasuk satu skuadron pesawat tempur Mikoyan-Gurevich MiG-29 dari Rusia di pangkalan militer wilayah Gyumri, Armenia. Selain itu, Rusia juga memfasilitasi Armenia dengan kemudahan untuk mengakuisisi peralatan tempur canggih, yaitu sistem arhanud 9K720 Iskander-M *short-range ballistic missile* dan beberapa pesawat tempur Sukhoi SU-30SM.

Kebutuhan Gas Turki

Pada bulan Juli 2020, terjadi konflik bersenjata antara Azerbaijan dan Armenia di wilayah Tovuz, Azerbaijan. Insiden tersebut merupakan peristiwa awal yang memicu meletusnya perang 44 hari. Tovuz sendiri merupakan wilayah yang penting bagi Azerbaijan dan Turki karena dilalui oleh tiga pipa gas alam yang penting dan saling berhubungan, yaitu South Caucasus Pipeline (SCP), Trans Anatolian Natural Gas Pipeline (TANAP), dan Trans Adriatic Pipeline (TAP) yang merupakan bagian dari Southern Gas Corridor. Jalur-jalur tersebut merupakan beberapa dari banyaknya jalur suplai minyak dan gas dari Azerbaijan ke Eropa yang melewati Turki dan menjadi aset yang sangat vital bagi kedua negara. Oleh karena itu, penting bagi Ankara untuk mendukung Azerbaijan dalam mengamankan wilayah Tovuz dari serangan Armenia demi keamanan pasokan energi Turki.

Peningkatan konsumsi energi gas dalam negeri, dapat dikatakan menjadi salah satu alasan mengapa Turki terlibat dalam 44-days war dan Konflik Nagorno-Karabakh. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Energi Exchange Istanbul (EXIST), dalam kurun waktu dari 2015 hingga 2019, impor gas Turki dari Rusia menurun secara signifikan dari 55% ke 34%. Kondisi ini berbeda dengan impor gas Turki dari Azerbaijan yang cenderung stabil bahkan mengalami peningkatan dari yang semula 13% pada tahun 2015 menjadi 21% pada tahun 2019. Turki dalam hal ini terlihat berusaha melakukan diversifikasi impor dengan menambah dari Azerbaijan agar tidak bergantung pada pasokan gas yang berasal dari Rusia. Kedekatan hubungan antara Turki dengan Rusia dalam beberapa tahun ini terjadi sebagai akibat dari memburuknya hubungan politik Turki dengan negara-negara Barat (Dalay,2021). Turki sedang mencari cara untuk mengatasi ketergantungan dan kerentanan strategis dari hubungan dekatnya dengan Rusia, salah satunya dengan melalui pengurangan impor gas. Secara sederhana, melalui pengurangan impor gas dari Rusia, Ankara dapat perlahan lepas dari pengaruh geopolitik Moskow. Oleh karena itu, Azerbaijan menjadi alternatif terbaik dalam pasokan energi gas untuk Turki sekaligus menyeimbangkan kepentingan politik dalam hubungannya dengan Rusia.

Arm Sales oleh Turki dan Rusia

Dalam September War tahun 2020 yang lalu, baik Rusia dan Turki sama-sama memberikan dukungannya terhadap Azerbaijan dengan mengeksport kebutuhan senjata militer. Meskipun Rusia bertindak sebagai mediator utama dalam konflik antara kedua negara, pada tahun 2011–20 Rusia menyumbang 94 persen dari impor senjata utama Armenia dan 60 persen

dari Azerbaijan SIPRI,2022). Menurut Anar Aliyev, hal tersebut dikarenakan adanya keinginan Rusia untuk mempertahankan kedua negara tersebut untuk tetap berorbit di dalam pengaruhnya. Berdasarkan analisa SIPRI, Stockholm International Peace Research Institute, selama tahun 2011–2020, Rusia merupakan negara pengekspor senjata utama terbesar ke Armenia dan Azerbaijan. Berbagai senjata yang diekspor ke Armenia oleh Rusia dari tahun 1992 hingga tahun 2017 adalah tank, misil, dan *rocket launchers*. Selama perang tahun 2020, Rusia mengeskalasi pasokan senjata dengan mengekspor senjata udara tanpa awak Orlan-10 (UAV) dan drones kepada Armenia. Untuk Azerbaijan, Rusia juga menjadi salah satu mitra dagang senjata utamanya. Walau Azerbaijan tidak hanya menerima persenjataan dari Rusia saja, namun juga negara-negara lain seperti Turki, Belarusia, dan Ukraina, Rusia tetap menyumbang 80% dari impor senjata Azerbaijan pada 2009–2013, namun menurun menjadi 31% pada 2015–2019.

Meskipun Turki telah menjadi sekutu politik terdekat Azerbaijan sejak awal 1990-an, Turki tidak menjadi pemasok persenjataan yang signifikan sampai tahun 2010-an. Pada tahun 2000, Turki melakukan penjualan pertamanya yang terdaftar di database SIPRI, ketika memasok kapal patroli AB-25 ke Azerbaijan. Turki mulai menyumbang 2,9 persen dari impor senjata utama Azerbaijan selama tahun 2011–20. Pengiriman dari Turki ke Azerbaijan pada periode ini termasuk kendaraan patroli lapis baja, artileri roket, rudal dan UAV bersenjata. UAV bersenjata, yang dikirim sesaat sebelum perang tahun 2020, termasuk setidaknya lima UAV Bayraktar-TB2 yang dipersenjatai dengan bom berpemandu MAM-L. Penggunaan UAV ini selama perang mendapat perhatian internasional yang signifikan. Meskipun tidak jelas apakah dan bagaimana Azerbaijan menggunakan senjata utama lainnya yang dipasok oleh Turki dalam *September War 2020*, beberapa laporan menunjukkan keterlibatan mereka. Misalnya, peluncur roket ganda TRG-300 yang dipasok Turki dilaporkan berada di posisi penting yang strategis untuk serangan Azerbaijan di Nagorno-Karabakh pada tahun 2020. Kenaikan persentase pasokan persenjataan Turki ke Azerbaijan ini tidak terlepas dari agenda Turki untuk meningkatkan pengaruhnya di daerah Kaukasus. Selain itu, hal ini membuktikan adanya peningkatan kepercayaan Azerbaijan terhadap Turki, dan sekaligus skeptisismenya Azerbaijan terhadap Rusia. Tidak seperti Armenia yang dependen terhadap Barat, Azerbaijan mulai menjauh dan melipir ke sekutu-sekutu lainnya di wilayah Eurasia, walau Azerbaijan telah lama mendiversifikasi pemasok senjatanya. Adanya ketakutan menguatnya pengaruh Rusia di Nagorno-Karabakh di dalam agenda Rusia memberikan bantuan terhadap Azerbaijan dan Armenia menjadi alasan kuat di balik keputusan tersebut.

Proxy War di Konflik Nagorno Karabakh

Isu perang Nagorno-Karabakh yang melibatkan Armenia dan Azerbaijan hingga kini tetap bertahan. Salah satu penyebab mengapa konflik ini awet selama berpuluh-puluh tahun adalah karena keterlibatan Rusia dan Turki di dalamnya. Dalam tulisan ini, peneliti akan mengaitkan peran kedua negara besar tersebut dengan konsep *proxy war*. Menurut jurnal yang ditulis Alex Marshall berjudul “*From civil war to proxy war: past history and current dilemmas*”, *proxy war* dapat diartikan sebagai sebuah momen di mana ketika negara-negara besar tengah menggunakan negara kecil untuk berperang demi mencapai kepentingannya (Marshall,2016). Berangkat dari hal tersebut, peneliti berhipotesis bahwa konflik di Nagorno

Karabakh ini bisa digolongkan sebagai *proxy war*. Rusia dan Turki merupakan aktor yang bisa dicap sebagai “negara besar” sedangkan Armenia & Azerbaijan itu tergolong “negara kecil”. Pada kasus ini, Rusia dan Turki memang sudah bersitegang sehingga mereka mencari cara untuk berkonflik tanpa merugikan apapun sehingga *proxy war* pun dipilih. Alhasil, kedua negara besar tersebut pun berusaha untuk mempersenjatai ataupun melindungi negara *proxy* agar tidak kalah konflik tersebut.

Dalam kasus ini, Armenia berada dalam posisi sebagai negara satelit dari Rusia, sedangkan Azerbaijan untuk Turki. Baik Rusia maupun Turki sebenarnya sudah bersitegang sejak beberapa tahun silam. Mulanya, konflik antar Rusia dan Turki itu muncul atas dasar keterlibatan pihak luar. Hal itu terjadi ketika pada saat dulu, Rusia memang sebenarnya sudah memihak Armenia sesaat sebelum perang. Mulanya, momen itu terjadi saat masa kepemimpinan Boris Yeltsin. Dikutip dari *Modern Diplomacy*, Armenia dulunya didorong oleh Prancis dan Inggris ke dalam konflik di Nagorno Karabakh. Berangkat dari hal itu, Rusia dicap seolah-olah yang mendorong Armenia untuk berkonflik dengan Azerbaijan. Alhasil, Turki yang sejak dulu telah memihak Azerbaijan pun ikut ke dalam isu tersebut. Pada akhirnya, istilah *proxy war* pun muncul dalam momen tersebut dengan kepentingan negara-negara besar (Rusia dan Turki) yang berbeda. Tidak hanya itu, aliansi antara Rusia-Armenia dan Turki-Azerbaijan juga disebabkan oleh kepentingan nasional bersama oleh kedua negara. Untuk pihak Turki-Azerbaijan, aliansi ini dilandaskan oleh prinsip Pan-Turkish “*One Nation, Two States*” sehingga keduanya bisa disebut memiliki persaudaraan kuat. Sedangkan Rusia-Armenia, kedua negara itu merupakan sekutu jangka Panjang sejak runtuhnya Uni Soviet pada 1991.

Dalam tulisan ini, teori *national interest* yang digagas oleh Morgenthau juga berlaku pada kepentingan Rusia di konflik Nagorno-Karabakh. Hal itu tercermin pada saat Rusia berusaha menjadi sosok penting dalam isu ini. Rusia memang tampak memberikan bantuan kepada Armenia, namun Kremlin juga tidak ingin melepas Azerbaijan begitu saja. Pada dasarnya, Rusia berlagak sebagai sosok yang bisa dipandang netral sehingga kedua negara yang berkonflik itu membutuhkan peran Kremlin dalam penyelesaian masalah. Selain itu, idealisme Rusia untuk menjadi penengah di konflik Nagorno-Karabakh juga didukung oleh keinginannya tetap menjaga hubungan dengan Turki. Bukannya tanpa alasan, Rusia tidak ingin Turki jatuh ke dalam aliansi barat melalui NATO (Amerika Serikat) sebab hal tersebut nantinya akan melemahkan posisi Rusia di Timur Tengah. Tidak hanya itu saja, Rusia juga khawatir dengan kemitraan yang dijalin Turki dan Ukraina sehingga hal tersebut bisa membahayakan kepentingan Rusia. Hal itu dilandaskan pada ketakutan Rusia jika Ukraina mengikuti jejak Azerbaijan yang membeli peralatan untuk pertempuran (drone) dari Turki. Jika hal tersebut diikuti oleh pihak Ukraina, maka tidak menutup kemungkinan negara yang beribukota di Kiev itu berani melakukan operasi serupa layaknya Azerbaijan. Berangkat dari hal tersebut, bisa dilihat bahwa kepentingan nasional Rusia dalam kasus ini sangatlah kompleks. Hal tersebut pun berpengaruh terhadap proses pengambilan kebijakan luar negeri Rusia yang cenderung bertujuan untuk mengamankan *power*-nya di kawasan Timur Tengah.

KESIMPULAN

Perang September War 44 hari merupakan konflik proxy Turki untuk memperbesar pengaruhnya di kawasan Kaukasus Selatan, khususnya di Azerbaijan. Turki mendukung Azerbaijan melalui ekspor peralatan militer buatannya untuk digunakan dalam perang tersebut, salah satunya adalah UAV (*Unmanned Aerial Vehicle*) bersenjata Bayraktar TB2. Terjadi kenaikan ekspor senjata dari Turki ke Azerbaijan tidak terlepas dari agenda Turki untuk meningkatkan pengaruhnya di daerah Kaukasus. Adapun kepentingan Turki terkait tindakan-tindakannya di Azerbaijan dilandasi oleh semangat “*one nation two states*” yang merupakan sebuah hubungan persaudaraan antara kedua negara yang berbudaya Turki. Selain melalui semangat “*one nation two states*”, kepentingan Turki yang membantu Azerbaijan dalam Perang September War 44 hari adalah untuk melindungi pasokan energi yang berasal dari Baku. Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan, peristiwa awal sebelum perang ini adalah konflik bersenjata antara pasukan Armenia dan Azerbaijan di wilayah Tovuz, Azerbaijan yang dilalui oleh jalur-jalur pipa dari Baku menuju Turki. Turki berusaha mengamankan kebutuhan dalam negerinya dengan mengandalkan pasokan dari Azerbaijan sekaligus bersamaan dengan pengurangan impor energi dari Rusia.

DAFTAR PUSTAKA

- “Arms Transfers to Conflict Zones: The Case of Nagorno-Karabakh.” SIPRI. Accessed January 4, 2022. <https://www.sipri.org/commentary/topical-background/2021/arms-transfers-conflict-zones-case-nagorno-karabakh>.
- “Azerbaijan-Russia Relations after the Five-Day War: Friendship, Enmity, or Pragmatism?” Accessed January 4, 2022. http://turkishpolicy.com/pdf/vol_10-no_3-valiyev.pdf.
- Bedford, Sofie. 2021. “Turkey and Azerbaijan: One Religion-Two States?” In *Turkish-Azerbaijani Relations. One Nation-Two States?*, 127-149. London: Routledge.
- Croissant, Michael P. *The Armenia-Azerbaijan Conflict: Causes and Implications*. Praeger, 1998.
- Dalay, Galip. 2021. *Turkish-Russian relations in light of recent conflicts: Syria, Libya, and Nagorno-Karabakh*. (SWP Research Paper, 5/2021). Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik -SWP- Deutsches Institut für Internationale Politik und Sicherheit. <https://doi.org/10.18449/2021RP05>
- “Hans Morgenthau.” *Encyclopædia Britannica*. Encyclopædia Britannica, inc. Accessed January 4, 2022. <https://www.britannica.com/biography/Hans-Morgenthau>.
- Ismailzade, Fariz. “TURKEY-AZERBAIJAN: THE HONEYMOON IS OVER.” *Turkish Policy*, February 5, 2006. <https://doi.org/http://turkishpolicy.com/images/stories/2005-04-neighbors/TPQ2005-4-ismailzade.pdf>.
- Klever, Emma. “The Nagorno-Karabakh Conflict between Armenia and Azerbaijan: An Overview of the Current Situation.” *European Movement*, September 24, 2013. <https://europeanmovement.eu/wp-content/uploads/2015/05/2013.09-Current-situation-Nagorno-Karabakh.pdf>.

- Lisbet. *KONFLIK ARMENIA DAN AZERBAIJAN SERTA UPAYA DAMAI MASYARAKAT INTERNASIONAL*, vol. XII, no. 19, 2020. http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XII-19-I-P3DI-Oktober-2020-238. Accessed 20 December 2021.
- MOLLOY, SEAN. “Truth, Power, Theory: Hans Morgenthau's Formulation of Realism.” *Diplomacy & Statecraft* 15, no. 1 (2004): 1–34. <https://doi.org/10.1080/09592-290490438042>.
- Nainggolan, Poltak Partogi. “ERDOGAN DAN TURKI SEBAGAI KEKUATAN BARU DI TIMUR TENGAH.” vol. XII, no. 16, 2020. https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XII-16-II-P3DI-Agustus-2020-160.pdf. Accessed 20 December 2021.
- Nazaretyan, Hovhannes. “Arms Supplies to Armenia and Azerbaijan.” EVN Report, February 17, 2021. <https://evnreport.com/spotlight-karabakh/arms-supplies-to-armenia-and-azerbaijan/#:~:text=Russia%20has%20been%20one%20of,%E2%80%932019%2C%20according%20to%20SIPRI>.
- Pham, J. Peter. “What Is in the National Interest? Hans Morgenthau's Realist Vision and American Foreign Policy.” *American Foreign Policy Interests* 37, no. 4 (2015): 187–93. <https://doi.org/10.1080/10803920.2015.1080073>.
- “Stockholm International Peace Research Institute.” SIPRI. Accessed January 4, 2022. <https://www.sipri.org/>.
- Suvari, Cakir C., and Elif Kanca. 2012. “Turkey and Azerbaijan: On the Myth of Sharing the same Origin and Culture.” *Iran and the Caucasus* 16, no. 2 (Juli): 247-256. 10.1163/1573384X-20120011.